



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor: 1179/H5.1.R/SK/SDM/2008

TENTANG

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2008**

Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1179/H5.1.R/SK/SDM/2008
Tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Sumatera Utara.
USU e-Repository © 2008.



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR: 1179/H5.1.R/SK/SDM/2008**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2008**



KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (USU-PT.BHMN) yang mempunyai visi "*University for Industry*" telah menentukan salah satu kebijakan operasionalnya adalah menumbuhkan dan menata organisasi dan manajemen Universitas yang sehat. Organisasi dan manajemen yang sehat akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi sivitas akademika dan pegawai dalam menjalankan tugasnya secara professional. Seorang yang bertugas secara professional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis. Hal ini penting karena di dunia modern dan global, kecepatan perkembangan aturan-aturan sering tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu dalam berorganisasi dan manajemen yang sehat, disusunlah pedoman standar perilaku etis dan disiplin dosen USU, melengkapi aturan-aturan secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki USU-PT. BHMN.

Pedoman ini perlu menjadi pegangan dosen USU-PT.BHMN dalam kehidupannya berorganisasi, bermasyarakat, bernegara dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Medan, 31 Mei 2008

Rektor,



Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K)
NIP. 130365289



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara	1
BABI : Ketentuan Umum	3
BAB II : Maksud dan Tujuan	4
BAB III : Kode Etik Dosen	5
Pasal 4 : Sikap Dasar	5
Pasal 5 : Kode Etik	6
Pasal 6 : Etika Pelaksanaan Tri Dharma	9
BAB IV : Penegakan Kode Etik	10
Pasal 7 : Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi	10
Pasal 8 : Pelaporan dan Pemeriksaan	11
Pasal 9 : Sanksi	12
BAB V : Peraturan Disiplin	12
Pasal 10 : Kewajiban Dosen	12
Pasal 11 : Perbuatan yang Dilarang	14
BAB VI : Penegakan Peraturan Disiplin	15
Pasal 12 : Pelanggaran Disiplin	15
Pasal 13 : Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin	16

	Pasal 14	: Pelaporan dan Pemeriksaan	16
	Pasal 15	: Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman	17
BAB VII	:	Sanksi Peraturan Disiplin	18
	Pasal 16	: Sanksi Peraturan Disiplin	18
BAB VIII	:	Ketentuan Penutup	19



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: 1179/H5.1.R/SK/SDM/2008**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. Bahwa Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara memberikan kemandirian, otonomi dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan Universitas Sumatera Utara.
- b. Bahwa Dosen memainkan peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan Universitas, karena Dosen merupakan salah satu komponen mutu yang mempengaruhi mutu keluaran yang dihasilkan Universitas. Oleh karena itu, Universitas senantiasa mendorong terbentuknya Dosen yang memiliki kompetensi yang tinggi dan akhlak yang terpuji.
- c. Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku Dosen Universitas Sumatera Utara yang lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas

di lingkungan Universitas Sumatera Utara guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik dan Peraturan Dosen Dosen Universitas Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Dosen Negeri Sipil.
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No. 1/SK/MWA/2005, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara.

Memperhatikan :

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara.
2. Upaya-upaya transformasi kelembagaan di lingkungan Universitas yang diarahkan untuk mewujudkan keunggulan akademik (*academic excellence*), kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Dosen Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

- (1). Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Universitas adalah Universitas Sumatera Utara.
- (3). Asas Universitas adalah dasar penyelenggaraan Universitas yang terdiri dari asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.
- (4). Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor.
- (5). Rektor adalah Rektor Universitas
- (6). Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Pembantu Dekan.
- (7). Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (8). Dosen adalah pegawai Universitas dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (9). Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi Dosen Universitas Sumatera Utara dalam kehidupan bernegara,

- bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (10). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Universitas.
 - (11). Tujuan Universitas adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Dosen Universitas Sumatera Utara adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Sumatera Utara adalah:

- (1) Membentuk Dosen Universitas yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas.
- (3) Mewujudkan keunggulan akademik (*academic excellence*), kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Membentuk komitmen bersama Dosen Universitas untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (5) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas.
- (6) Mengangkat harkat dan martabat Dosen Universitas.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.

- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- (9) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (11) Bertindak tidak diskriminatif.
- (12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.
- (14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Universitas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Dosen wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Dosen.
- (2) Etika bernegara bagi Dosen meliputi:
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
 - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi:
- a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a) Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan

- adil serta tidak diskriminatif;
- e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama Dosen dan pegawai Universitas, meliputi:
- a) Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d) Menghargai perbedaan pendapat;
 - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai;
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai;
 - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
 - b) Mengembangkan dan merangsang pemikiran

- kreatif dan inovatif mahasiswa;
- c) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - d) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - e) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - f) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - g) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
 - h) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - i) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - j) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - k) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - l) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Bagian Ketiga **Etika Pelaksanaan Tri Dharma**

Pasal 6

Setiap Dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi Etika Pelaksanaan Tri Dharma, sebagai berikut:

- (1) Sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa.
- (4) Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan (role model) bagi mahasiswa.

- (5) Berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka.
- (6) Bersungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (7) Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (8) Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (9) Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Universitas.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 7

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Dosen, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Pimpinan Universitas.
- (4) Pimpinan Universitas dapat menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen berhak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Dosen bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Dosen yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Pimpinan Universitas sebagai laporan.
- (6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 9

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- (2) Hukuman moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi selama dua semester.
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tertutup.
- (4) Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen.

BAB V PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Kewajiban Dosen

Pasal 10

Setiap Dosen Universitas wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Universitas.
- (4) Menyimpan rahasia Universitas dan atau rahasia

- jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
 - (6) Melaksanakan tugas Universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
 - (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Universitas.
 - (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen.
 - (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana.
 - (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
 - (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
 - (12) Menggunakan dan memelihara aset Univeritas dengan sebaik-baiknya.
 - (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
 - (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
 - (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
 - (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
 - (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
 - (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
 - (19) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
 - (20) Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
 - (21) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
 - (22) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan

- peraturan kedinasan yang berlaku.
- (23) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
 - (24) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua Perbuatan yang Dilarang

Pasal 11

Setiap Dosen dilarang:

- (1). Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas.
- (2). Menyalahgunakan wewenangnya.
- (3). Tanpa izin *Pimpinan* Universitas menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja.
- (4). Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.
- (5). Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Universitas secara tidak sah.
- (6). Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas.
- (7). Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (8). Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan.

- (9). Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan.
- (10). Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (11). Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- (12). Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
- (13). Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (14). Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (15). Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB VI PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 12

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Pimpinan Universitas.

Bagian Kedua **Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin**

Pasal 13

- (1) Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin Dosen, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Pimpinan Universitas.

Bagian Ketiga **Pelaporan dan Pemeriksaan**

Pasal 14

- (1) (a) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan Universitas secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. (b) Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (3) Pimpinan Universitas dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Dosen Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim *tersebut* untuk

- memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Dosen yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup.

Bagian Keempat

Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

Pasal 15

- (1) Tim Pembinaan Dosen Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Dosen disampaikan kepada Pimpinan Universitas.
- (3) Rekomendasi disampaikan kepada Dosen yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Dosen, Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Universitas atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
- (5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Dosen yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Dosen serta keberatan Dosen.
- (6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VII SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 16

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - i. tegoran lisan;
 - ii. tegoran tertulis; dan
 - iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari :
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari :
 - i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. pembebasan dari jabatan;
 - iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Dosen Universitas serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan.
- (3) Keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Sumatera Utara ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Universitas yang sesuai dengan Asas Universitas sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara.
- (2) Setiap Dosen memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 31 Mei 2008

REKTOR



Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K)
NIP. 130365289



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: 1180/H5.1.R/SK/SDM/2008**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL **2008**
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR: 1180/H5.1.R/SK/SDM/2008**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN
PEGAWAI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2008**



KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (USU-PT.BHMN) yang mempunyai visi “University for Industry” telah menentukan salah satu kebijakan operasionalnya adalah menumbuhkan dan menata organisasi dan manajemen Universitas yang sehat. Organisasi dan manajemen yang sehat akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi sivitas akademika dan pegawai dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seorang yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis. Hal ini penting karena di dunia modern dan global, kecepatan perkembangan aturan-aturan sering tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu dalam berorganisasi dan manajemen yang sehat, disusunlah pedoman standar perilaku etis dan disiplin pegawai USU, melengkapi aturan-aturan secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki USU-PT.BHMN.

Pedoman ini perlu menjadi pegangan pegawai USU-PT.BHMN dalam kehidupannya berorganisasi, bermasyarakat, bernegara dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Medan, 31 Mei 2008

Rektor,



Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K)
NIP. 130365289



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara	1
BAB I : Ketentuan Umum	3
BAB II : Kode Etik Pegawai	6
Pasal 4 : Sikap Dasar	6
Pasal 5 : Kode Etik	7
BAB III : Penegakan Kode Etik	10
Pasal 6 : Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi	10
Pasal 7 : Pelaporan dan Pemeriksaan	10
Pasal 8 : Sanksi	11
BAB IV : Peraturan Disiplin	12
Pasal 9 : Kewajiban Pegawai	12
Pasal 10 : Perbuatan yang Dilarang	13
BAB V : Penegakan Peraturan Disiplin	15
Pasal 11 : Pelanggaran Disiplin	15
Pasal 12 : Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin	15
Pasal 13 : Pelaporan dan Pemeriksaan	16
Pasal 14 : Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman	16

BAB VI	: Sanksi Peraturan Disiplin	17
	Pasal 15 : Sanksi Peraturan Disiplin	17
BAB VII	: Ketentuan Penutup	18



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: 1180/H5.1.R/SK/SDM/2008**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. Bahwa Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara memberikan kemandirian, otonomi dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan Universitas Sumatera Utara.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Universitas Sumatera Utara telah melakukan upaya transformasi di berbagai bidang.
- c. Bahwa transformasi kelembagaan di lingkungan Universitas tidak saja meliputi transformasi manajemen pengelolaan Universitas, struktur organisasi, dan keuangan, tetapi juga meliputi transformasi kultural dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki Universitas, termasuk para pegawai Universitas.
- d. Transformasi kultural tidak saja ditujukan untuk membentuk sikap pegawai yang professional, mandiri dan menghormati

profesi dengan senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang terbaik, juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya pribadi yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi yang pantas menjadi panutan di lingkungan Universitas dan teladan di tengah masyarakat.

- e. Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku pegawai Universitas Sumatera Utara yang baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Sumatera Utara guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No. 1/SK/MWA/2005, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara.

Memperhatikan :

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara.
2. Upaya-upaya transformasi kelembagaan di lingkungan Universitas yang diarahkan untuk mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

- (1) Asas Universitas adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan Universitas yang terdiri dari asas keimanan

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.

- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Sumatera Utara.
- (3) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (4) Pegawai adalah setiap pegawai Universitas baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga penunjang sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas.
- (5) Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi pegawai Universitas Sumatera Utara dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas.
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Universitas.
- (7) Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor.
- (8) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Pembantu Dekan.
- (9) Tujuan Universitas adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip

pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.

- (10) Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh pegawai Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara adalah:

- (1) Terbentuknya Pegawai Universitas yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas.
- (3) Mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Terbentuknya komitmen bersama pegawai Universitas untuk mendukung Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas.
- (5) Terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas.
- (6) Untuk mengangkat harkat dan martabat Pegawai Universitas.

BAB II KODE ETIK PEGAWAI

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Pegawai Universitas wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Berimanan dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- (9) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (11) Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.
- (12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat.
- (13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
- (14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Universitas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai Universitas wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Pegawai Universitas.
- (2). Etika bernegara bagi Pegawai Universitas meliputi:
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
 - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
 - i) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi:
 - a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

- e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
 - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
 - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
 - b) Mewujudkan pola hidup sederhana.
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

- (6) Etika terhadap sesama pegawai Universitas, meliputi:
- a) Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d) Menghargai perbedaan pendapat;
 - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - b) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e) Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
 - f) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - g) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - h) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - i) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - j) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 6

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Pegawai Universitas, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor.
- (4) Rektor menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat pegawai bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Pegawai yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (6) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 8

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- (2) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.

BAB IV PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Kewajiban Pegawai

Pasal 9

Setiap Pegawai Universitas wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Universitas.
- (4) Menyimpan rahasia Universitas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Universitas.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Universitas.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau Universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Universitas dengan sebaik-baiknya.

- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
- (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua Perbuatan yang Dilarang

Pasal 10

Setiap Pegawai Universitas dilarang:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Universitas.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya.

- (3) Tanpa izin Universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam negeri maupun lembaga asing.
- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau Universitas secara tidak sah.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Universitas.
- (7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau sebagai pegawai Universitas.
- (9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan.
- (10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (11) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- (12) Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
- (13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (14) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas.

- (15) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan di atas adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Rektor.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Pegawai yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (3) Rektor dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Pegawai Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

Pasal 14

- (1) Tim Pembinaan Pegawai Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat

- dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Pegawai disampaikan kepada Rektor.
 - (3) Rekomendasi disampaikan kepada Pegawai yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
 - (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai, Pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
 - (5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan Pegawai.
 - (6) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
 - (7) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VI **SANKSI PERATURAN DISIPLIN**

Pasal 15

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - i. tegoran lisan;
 - ii. tegoran tertulis; dan
 - iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan

- iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. pembebasan dari jabatan;
 - iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan yang diajukan Pegawai yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Pegawai Universitas dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Universitas yang sesuai dengan Asas Universitas sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara.
- (2) Setiap Pegawai Universitas memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara ini.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal: 31 Mei 2008

REKTOR



Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K)
NIP. 130365289

